

# **LAPORAN RENCANA KERJA (RENJA)**



**KECAMATAN MANTIKULORE  
TAHUN 2023**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, sehingga Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Mantikulore Tahun 2023 dapat diselesaikan penyusunannya. Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Mantikulore Tahun 2023 mempunyai arti strategis karena di dalamnya nenuat uraian program dan kegiatan yang dirumuskan berdasarkan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun sebelumnya. Peningkatan Kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah di tetapkan dalam perencanaan strategis diharapkan dapat berjalan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan.

Penyusunan RENJA Tahun 2023 merupakan kewajiban bagi setiap perangkat daerah. Renja Kecamatan Mantikulore disamping berfungsi sebagai pedoman kerja dan dokumen, juga diharapkan menyatukan visi, misi, persepsi dan strategi Kecamatan Mantikulore dalam membina, melayani dan memfasilitasi serta untuk dapat memacu kinerja pada tahun yang akan datang, terutama peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia pada Kecamatan Mantikulore Tahun 2023.

Dalam Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Instansi Pemerintah ini, kami telah berupaya secara optimal, namun kami menyadari bahwa dalam penyusunannya masih jauh dari sempurna dan belum sepenuhnya dapat memenuhi harapan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu dengan tangan terbuka, masukan dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan untuk perbaikan serta penyempurnaan Penyusunan Laporan di tahun yang akan datang.

Akhir kata semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi kita semua khususnya dalam mengevaluasi Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Mantikulore.

Palu, 02 Oktober 2023

**CAMAT MANTIKULORE**



**RIDWAN MUSTAPA, S.Sos., M.Adm.KP**

NIP. 19720306 200501 1 010

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	4
1.3 Maksud dan Tujuan.....	9
1.4 Sistematika Penulisan.....	9

BAB II EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) SAMPAI DENGAN

TRIWULAN II KECAMATAN MANTIKULORE TAHUN 2023

1.1 Evaluasi Pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Tahun 2023 dan capaian Renstra Kecamatan Mantikulore sampai dengan Triwulan.....	11
1.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Mantikulore .....	20
1.3 Isu Penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD.....	23
1.4 Review Terhadap Rancangan Program Perubahan RKPD Kota Palu Tahun 2023.....	26
Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat...	33

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN

MANTIKULORE

BAB IV PENUTUP

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perubahan Renja Kecamatan Mantikulore dan Pencapaian Renstra Kecamatan Mantikulore Sampai Dengan Tahun 2022.....	16
Tabel 2.2	Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Mantikulore.....	22
Tabel 2.3	Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD.....	28
Tabel 2.4	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023 .....	33
Tabel 3.1	Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Mantikulore Tahun 2023.....	39

**1.1 LATAR BELAKANG**

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya di singkat dengan RENJA adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) Tahun. Fungsi Rencana Kerja perangkat Daerah adalah sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan, setiap urusan bidang dan atau/fungsi pemerintah untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun. Di samping itu dengan adanya renstra dapat menjadikan sasaran dan tujuan pembangunan yang terdapat dalam RPJMD terlaksana, sesuai dengan sistematis dan terukur.

Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Kecamatan Mantikulore Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan Kecamatan Mantikulore untuk periode 1 (Satu) Tahun kedepan (perencanaan jangka menengah) yang disusun dan dirumuskan dengan berpedoman pada Rencana Strategis Kecamatan Mantikulore (RENSTRA) Kota Palu Tahun 2021-2026 serta memperhatikan tugas pokok dan fungsi Kecamatan. Di dalam Renstra ini memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan pembangunan Kecamatan Mantikulore selama kurun waktu 1 (satu) Tahun dengan memperhatikan kebijakan dan prioritas program Pemerintah Kota Palu.

Adapun proses penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Mantikulore periode 2023 dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :

1. Persiapan penyusunan Rancangan Awal Renja.
2. Penyusunan Rancangan Awal Renja Kecamatan Mantikulore.
3. Penyusunan Rancangan Renja Kecamatan Mantikulore.
4. Perumusan Rancangan Akhir Renja Kecamatan Mantikulore.
5. Penetapan Renja Kecamatan Mantikulore.

Perubahan Rencana Kerja menentukan arah kemana suatu organisasi dibawa pada Tahun kedepan atau Tahun-Tahun berikutnya, bagaimana cara mengarahkannya dan bagaimana mengevaluasi keberhasilan dan ketidakberhasilannya. Fokus dari perencanaan strategis biasanya keseluruhan organisasi. Adapun cakupan perencanaan strategis meliputi visi, misi, tujuan, dan sasaran, metodologi, analisis situasi, tujuan objektivitas dan target. Maka dalam proses penyusunannya tentu memperhatikan semua aspek perencanaan pembangunan.

Perencanaan pembangunan nasional seperti yang tertuang dalam rencana pembangunan nasional RPJMN menetapkan 9 misi dalam upaya mewujudkan visi pemerintah. 9 misi dalam RPJMN harus menjadi landasan bagi pemerintah dibawahnya yaitu provinsi dan kabupaten/kota untuk menyelaraskan perencanaanya dalam mendukung visi pembangunan, maka misi yang diemban oleh Kecamatan Mantikulore, yaitu misi 4 RPJMD kota palu yakni menciptakan pemerintahan yang profesional dan selalu hadir melayani hal ini selaras dengan Misi VI, VII, VIII, dan IX yang ada pada RPJMN 2021-2026 dan sesuai dengan arah pembangunan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 seperti yang tertuang dalam visi pemerintah provinsi yaitu “Gerak Cepat Menuju Sulawesi Tengah Lebih Sejahtera dan Lebih Maju”.

Dokumen Renstra Kecamatan Mantikulore disusun dengan memperhatikan 4 (empat) pendekatan yaitu pendekatan teknokratis, pendekatan partisipatif, pendekatan politis, dan pendekatan perpaduan antara Bottom-Up dengan Top Down Planning. Pendekatan teknokratis dalam perencanaan pembangunan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Pendekatan partisipatif merupakan proses penyusunan dokumen Renstra yang dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan melibatkan masyarakat (stakeholder) dalam pengambilan keputusan perencanaan di semua tahapan perencanaan. Pendekatan politik bermakna bahwa penyusunan Renstra mengacu pada visi dan misi Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dan dibahas bersama DPRD dan ditetapkan dalam peraturan perundangan daerah. Pendekatan perencanaan pembangunan daerah bawah-atas (bottom-up) dan atas-bawah (top-down), yaitu penyusunan perencanaan pembangunan daerah diselaraskan melalui musyawarah rencana pembangunan di tingkat Kelurahan sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran rencana pembangunan daerah dan rencana pembangunan di Kecamatan.

Dokumen Perubahan Renja Kecamatan Mantikulore Tahun 2023 ini merupakan hasil proses politik yang bermula dari rumusan visi, misi dan program Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih dimana dalam proses penyusunannya dilakukan melalui serangkaian forum musyawarah perencanaan partisipatif dengan melibatkan unsur-unsur pelaku pembangunan dan memasukkan pula segenap komponen perencanaan teknokratik, yakni program dan kegiatan Kecamatan Mantikulore. Sejalan dengan itu, muatan Renja Kecamatan Mantikulore Tahun 2023 ini juga memperhatikan pula arahan kebijakan dan program Renstra Kecamatan Mantikulore. Oleh karena itu matriks rencana program dan kegiatan pembangunan Tahunan yang diuraikan dalam dokumen perencanaan ini disusun secara integratif dan komprehensif yang nantinya dijabarkan dalam Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP) Kecamatan Mantikulore selama 1 (satu) Tahun anggaran.

Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Kecamatan Mantikulore Tahun 2023 memiliki keterkaitan dengan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan lainnya seperti :

1. Renstra Kecamatan Mantikulore Tahun 2021-2026 ini memperhatikan arahan kebijakan dan program pembangunan yang ada pada Renstra Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Tahun 2020-2024;
2. Perubahan Renja Kecamatan Mantikulore Tahun 2023 ini memperhatikan arahan kebijakan dan program

- pembangunan yang ada pada Rencana Kerja Tahunan (RKT) Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Tahun 2023;
3. Dalam kaitan dengan sistem keuangan sebagaimana yang diamanatkan Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003, maka penjabaran Renstra dalam Renja untuk setiap Tahunnya akan dijadikan pedoman bagi penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran SKPD (RKA SKPD).

## **1.2 Landasan Hukum**

Sebagai landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Kedua Rencana Strategis PD Kecamatan Mantikulore di bawah ini dikemukakan beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Palu (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor

- 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

- Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 892);
  15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);
  16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan

- Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  22. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 17 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Palu Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 14);
  23. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 4);
  24. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
  25. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 2);
  26. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
  27. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 34 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 34, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 34);
  28. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 31 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

29. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Palu Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 14)

### **1.3. MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **A. Maksud**

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Mantikulore Tahun 2023 ini adalah tersedianya dokumen perencanaan yang memberikan arah dan pedoman perencanaan program kegiatan pembangunan di Kecamatan Mantikulore untuk periode 1 (satu) Tahun ke depan.

#### **B. Tujuan**

Tujuan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Mantikulore Tahun 2023 ini adalah, sebagai berikut:

1. Secara substansial : Sebagai arah kebijakan Kecamatan Mantikulore dalam pencapaian Visi Misi Pemerintah Kota Palu.
2. Secara normatif : Menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP) Kecamatan Mantikulore.
3. Secara operasional : Menjadi arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan untuk penunjang urusan kewilayahan.
4. Secara faktual : menjadi tolak ukur untuk menilai capaian kinerja Kecamatan Mantikulore.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Adapun substansi penyusunan Renja (Rencana Kerja) menurut Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan.

## BAB II HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

- 2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Mantikulore Tahun lalu dan capaian Renstra Kecamatan Mantikulore
- 2.2 Analisis kinerja pelayanan Kecamatan Mantikulore
- 2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Mantikulore
- 2.4 Review terhadap Rancangan awal RKPD dan Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

## BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Perubahan Rencana Kerja yang sesuai dengan Program dan Kegiatan Kecamatan Mantikulore yang berdasarkan Rencana Kerja Anggaran Perubahan Tahun 2023

## BAB IV PENUTUP

Berisi catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam rangka pelaksanaan program kegiatan. Kaidah-kaidah pelaksanaannya, serta rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan melalui penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Mantikulore.

### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Tahun 2023 dan capaian Renstra Kecamatan Mantikulore sampai dengan Triwulan II.**

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Mantikulore adalah penjabaran perencanaan Tahunan dan Rencana Strategis Kecamatan tersebut, Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Kecamatan Mantikulore ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Kecamatan Mantikulore selama Tahun 2023 dan perkiraan target Tahun 2024. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut :

#### **1. Penetapan Indikator Kinerja**

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

#### **2. Capaian Analisis Kinerja**

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Untuk melakukan evaluasi anggaran di Tahun 2023, Kecamatan Mantikulore mengacu pada tugas dan fungsi Kecamatan beserta kewenangan pelayanan yang diberikan oleh Wali Kota kepada Camat. Tugas Pokok Kecamatan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Palu serta berdasarkan Peraturan Wali Kota Palu Peraturan Wali Kota Palu Nomor 34 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan, Kecamatan adalah membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan dalam wilayah Kecamatan sesuai kewenangan yang dilimpahkan oleh Wali Kota Palu.

Adapun fungsi dari Kecamatan Mantikulore adalah :

1. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum;
2. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat,
3. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum,
4. Mengoordinasikan penerapan dan penegakkan perda dan Perkada;
5. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum,;
6. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Kelurahan;
8. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kota yang tidak dilaksanakan oleh OPD yang ada di Kecamatan.
9. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

10. Melaksanakan pelimpahan sebagian kewenangan Wali Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota.

Pada Tahun 2023 Kecamatan Mantikulore melaksanakan 4 (Empat) Program, 10 (Sepuluh) Kegiatan dan 30 (Tiga Puluh) Sub. Kegiatan dengan uraian sebagai berikut :

1. Program Penujang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
  - 1.1. Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
    - b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
    - c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD
    - d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
  - 1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
    - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan.
    - b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.
  - 1.3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
    - a. Penyediaan Komponen Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
    - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
    - c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
    - d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
    - e. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
    - f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
    - g. Fasilitasi Kunjungan Tamu
    - h. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
  - 1.4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
    - a. Pengadaan Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

- b. Pengadaan Mebel
  - c. Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya
  - d. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya.
  - e. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya.
- 1.5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 1.6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  - b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya
  - c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- 2.1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
- a. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
- 3.1. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
- a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
  - b. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
  - c. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
- 3.2 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
- a. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan

4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum
  - 4.1. Penyelenggaraan Urusan Umum Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
    - a. Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal Regional dan Nasional

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Mantikulore Tahun 2023 dan pencapaian Renstra Kecamatan Mantikulore sampai dengan Tahun 2026 serta Rekapitulasi Realisasi sampai dengan Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.1 di bawah ini.

**Tabel 2.1**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perubahan Renja Kecamatan Mantikulore dan Pencapaian Renstra Kecamatan Mantikulore sampai dengan Tahun 2022 Kota Palu**

KODE	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021 S/D 2026 Akhir Periode Rentsra PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan S/D Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan II Tahun 2023	
					Target Renja OPD Tahun 2023	Realisasi Renja OPD Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (5/7)	10 = (8/4)
7.01.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Nilai Evaluasi Kinerja Kecamatan			2673	-			
7.01.01.2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	20 Dokumen						
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0,200 Dokumen
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0,200 Dokumen
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0,200 Dokumen
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0,200 Dokumen

<b>7.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Realisasi Keuangan</b>	100%										
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	510 Orang	100 Orang	101 Orang	101 Orang	1 Orang	1 Orang	0,002	Orang			
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasi IKoordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	0,200	Laporan			
<b>7.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	100%										
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	118 Paket	19 Paket	22 Paket	22 Paket	1 Paket	1 Paket	0,008	Paket			
7.01.01.2.06.02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	20 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	1 Paket	1 Paket	0,050	Paket			
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	118 Paket	19 Paket	22 Paket	22 Paket	1 Paket	1 Paket	0,008	Paket			
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik yang disediakan	20 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	1 Paket	1 Paket	0,050	Paket			
7.01.01.2.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	15 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	1 Paket	1 Paket	0,067	Paket			
7.01.01.2.06.06	Penyediaan bahan bacaan dan perundang undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan yang disediakan	492 Dokumen	96 Dokumen	99 Dokumen	99 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0,002	Dokumen			
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	55 Laporan	11 Laporan	11 Laporan	11 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	0,018	Laporan			
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	137 Laporan	25 Laporan	27 Laporan	27 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	0,007	Laporan			

<b>7.01.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah</b>	100%										
7.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	6 Unit	1 Unit	2 Unit	2 Unit	1 Unit	1 Unit	0,167	Unit			
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	48 Paket	8 Paket	10 Paket	10 Paket	1 Paket	1 Paket	0,021	Paket			
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Paket Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	48 Paket	8 Paket	10 Paket	10 Paket	1 Paket	1 Paket	0,021	Paket			
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	48 Unit	8 Unit	10 Unit	10 Unit	1 Unit	1 Unit	0,021	Unit			
7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	48 Unit	8 Unit	10 Unit	10 Unit	1 Unit	1 Unit	0,021	Unit			
<b>7.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	100%										
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	0,017	Laporan			
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	405 Laporan	81 Laporan	81 Laporan	81 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	0,002	Laporan			
<b>7.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah</b>	100%										
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	112 Unit	15 Unit	22 Unit	22 Unit	1 Unit	1 Unit	0,009	Unit			
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Mesin Lainnya yang dipelihara	333 Unit	52 Unit	63 Unit	63 Unit	1 Unit	1 Unit	0,003	Unit			
7 01 02 2 09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	193 Unit	28 Unit	35 Unit	35 Unit	1 Unit	1 Unit	0,005	Unit			
<b>7.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	BAIK		84,50%	-							
<b>7.01.02.2.01</b>	<b>Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>Cakupan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	100%										
7 01 02 2 01 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	0,200	Laporan			

7.01.03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100%		2673	-						
7.01.03.2.02	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan</b>	100%									
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Terlaksananya Musrenbang	200 Lembaga	40 Lembaga	40 Lembaga	40 Lembaga	40 Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga	0,005	Lembaga	
7.1.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	95 Unit	15 Unit	16 Unit	16 Unit	1 Unit	1 Unit	0,011	Unit		
7.1.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	35 Pokmas	7 Pokmas	7 Pokmas	7 Pokmas	1 Pokmas	1 Pokmas	0,029	Pokmas		
7.01.03.2.03	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	<b>Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan</b>	100%									
7.1.02.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	200 Lembaga	40 Lembaga	40 Lembaga	40 Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga	0,005	Lembaga		
7.01.05	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%		2673	-						
7.01.05.2.01	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>Terselenggaranya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	100%									
7.1.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antar suku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	182 Orang	22 Orang	56 Orang	56 Orang	1 Orang	0 Orang	0,005	Orang		

Berdasarkan Tabel diatas dapat kita lihat bahwa kegiatan diatas sudah mencapai target yang telah direncanakan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain :

1. Kebijakan Pimpinan yang mendukung pencapaian target.
2. Sarana dan prasaran yang memadai.
3. SDM Kecamatan mendukung dalam melaksanakan program kegiatan di maksud.

Akan tetapi ada beberapa program kegiatan yang belum mencapai target yang sudah ditetapkan antara lain :

1. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
2. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

Hal ini disebabkan oleh beberapa factor antara lain :

1. Adanya perbedaan volume pekerjaan yang mengakibatkan pembengkakan pada rencana anggaran biaya pada beberapa pekerjaan.
2. Tidak maksimalnya KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) dalam menangani Pekerjaan yang dilimpahkan, sehingga sangat berpengaruh pada realisasi anggaran Triwulan II Tahun 2023 di Kecamatan Mantikulore.
3. Karena adanya kebijakan mengenai pengelolaan pada kegiatan dana Alokasi Umum Tambahan (DAUT) sehingga dalam pelaksanaan kegiatan pada tahap ke II tidak dapat direalisasikan sebanyak 100 %.

## **2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Mantikulore**

Kecamatan Mantikulore yang berfungsi sebagai PD Koordinatif dan Pelayanan masyarakat mempunyai tujuan utamanya adalah untuk kepuasan pelayanan masyarakat secara umum, capaian kinerja pelayanan PD Kecamatan Mantikulore dapat dicapai bila Indeks Kepuasan Masyarakat

tercapai sesuai dengan target yang ada di RPJMD Kota Palu Tahun 2021 – 2026.

Kecamatan Mantikulore merupakan perangkat daerah yang menjalankan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam bidang tugas-tugas Camat dan tidak ada ketentuan/peraturan perundang-undangan yang mengamanatkan standar pelayanan minimal tertentu/lainnya selain ketentuan tentang Indikator Kinerja Utama yang dimiliki.

Kecamatan Mantikulore sebagai sebagai salah satu Perangkat Daerah yang dalam pelaksanaan tugasnya tidak saja berurusan dengan aspek pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan administrasi Pemerintah Kecamatan semata melainkan juga merupakan ujung tombak pelayanan masyarakat di tingkat Kecamatan. Oleh karenanya capaian kinerja pelayanannya lebih banyak dianalisis dari sudut pandang tugas pokok dan fungsi Kecamatan dan juga indikator kinerja output yang dihasilkan dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Mantikulore Tahun 2021-2026 merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Mantikulore sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Mantikulore. Indikator Kinerja Utama tersebut tertuang dalam Rencana Strategis Perubahan (RENSTRA-P) Kecamatan Mantikulore Tahun 2021-2026 sebagai penjabaran dalam Rancangan RPJMD Perubahan Kota Palu Tahun 2021-2026 yang menjadi tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kota Palu. Pencapaian kinerja pelayanan PD Kecamatan Mantikulore dapat dilihat sebagaimana Tabel 2.2 sebagai berikut :

**TABEL 2.2**  
**CAPAIAN KINERJA PELAYANAN KECAMATAN MANTIKULORE**

NO	INDIKATOR	SPM / STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RESTRA PERANGKAT DAERAH			REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI	
				2022	2023	2024	2023	2024	2023	2024
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	x	xi	xi	xii
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			84,00 %	84,50 %	85,00 %	85,74 %	-	Baik 84,76	Baik 84,77
2	Nilai Evaluasi Kinerja Kecamatan (EKK)			2573	2673	2773	-	-	2673	2773

### **2.3. Isu Penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD**

Analisis isu-isu strategi merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana strategi Perangkat Daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategi meningkatkan prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral dan etika birokrasi dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan mengintegrasikan kajian permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah, isu-isu strategi Kecamatan Mantikulore yang menjadi landasan penyusunan visi dan misi Kecamatan Mantikulore 5 (lima) Tahun mendatang adalah sebagai berikut :

#### **a. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat**

Pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Kecamatan Mantikulore sering menjadi tolok ukur dari citra (nama baik) Kecamatan sampai pada tataran pemerintah yang lebih tinggi. Kecamatan merupakan organisasi perangkat daerah yang berfungsi sebagai garda terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu citra pelayanan yang dapat diberikan oleh Kecamatan kepada masyarakat berpengaruh terhadap citra pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Palu pada umumnya. Perbaikan dan peningkatan kualitas dalam system pelayanan di tingkat Kecamatan menjadi hal yang harus ditingkatkan.

Upaya untuk mewujudkan agar Kecamatan menjadi pusat pelayanan masyarakat adalah dikeluarkannya Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 tentang pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). Seluruh Kecamatan di Kota Palu telah melaksanakan PATEN. Itulah perwujudan tekad Pemerintah Kota Palu dalam

melakukan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya masih rendahnya kualitas pelayanan publik baik dalam pelayanan dasar masyarakat maupun pelayanan perijinan hal ini menyebabkan masih adanya faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan pembangunan di Kota Palu, khususnya yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat. Berdasarkan data Tahun 2020, permasalahan yang menjadi faktor penghambat tersebut yaitu : 1) Masih rendahnya Integritas dan profesionalitas aparatur pemerintah Kecamatan, 2) Integritas dan profesionalitas aparatur pemerintah Kecamatan perlu ditingkatkan, 3) Belum Terlaksananya Standart Operasional Prosedur (SOP) dalam Pelayanan, 4) Minimnya SDM Petugas Pelayanan.

b. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat

Meningkatkan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan dengan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan atau kebijakan dalam pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah merupakan tolok ukur keberhasilan pemberdayaan masyarakat. Selain itu keterlibatan komponen atau unsur masyarakat dalam perencanaan pembangunan menjadi sebuah tuntutan pengarusutamaan gender dimana kelompok masyarakat rentan harus mendapatkan hak akses dan partisipasi. Pengambilan kebijakan Kecamatan yang diawali atau dimulai dari proses Musyawarah Pembangunan jelas telah melibatkan berbagai unsur dalam masyarakat. Maka kegiatan-kegiatan yang direncanakan merupakan hasil dari masukan masyarakat melalui Musrenbang. Selain itu sasaran dari program kegiatan juga mengacu pada kelompok rentan sesuai yang tertera pada Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia yaitu anak-anak, perempuan, lansia, warga miskin. Ada satu kelompok sasaran yang secara tugas pokok dan

fungsi bukan merupakan kewenangan Kecamatan yaitu bagi difable. Secara kewenangan penanganannya merupakan tugas dari Dinas Sosial sehingga Kecamatan bersifat membantu atau fasilitasi.

Program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Kecamatan Mantikulore melalui kegiatan fisik maupun non fisik, mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan. Dalam pelaksanaan kegiatannya sasaran dan pelaksanaannya dengan melibatkan masyarakat. Adapun lembaga pemberdayaan Masyarakat yang di fasilitasi oleh Kecamatan sesuai dengan PERMENDAGRI Nomor 5 Tahun 2007 yaitu :

1. Rukun Tetangga (RT);
2. Rukun Warga (RW);
3. Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
4. Karang Taruna (KARTAR);
5. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM);
6. Lembaga Adat;
7. LINMAS;
8. Kelompok Pemberdayaan Masyarakat; dan
9. Lembaga Lainnya.

Dengan adanya peran serta Lembaga Pemberdayaan Masyarakat tersebut diharapkan dapat bersinkronisasi dengan program dan kegiatan Kecamatan Mantikulore dalam pencapaian 53 program pembangunan pemerintah Kota Palu. Adapun program dan kegiatan Kecamatan Mantikulore yang mendukung 53 Program program pembangunan pemerintah Kota Palu adalah :

1. Bidang Ekonomi
  - 1) Penguatan UMKM
2. Sosial Kependudukan

- 1) Peningkatan kesejahteraan dan kualitas kerja masyarakat padat karya
- 2) Palu Religi
- 3) Event olahraga tahunan Kota Palu
3. Infrastruktur
  - 1) Pembangunan kawasan olahraga Kota Palu
  - 2) Ruang terbuka hijau/public area per-Kecamatan
4. Birokrasi & Keuangan
  - 1) Peningkatan kesejahteraan pegawai honorer
  - 2) Pelayanan pembuatan KTP, KK dan Akte lahir di kantor kelurahan
5. Pelayanan Dasar
  - 1) Kesehatan
    - 1) Palu Kota Sehat
    - 2) BPJS gratis bagi warga tidak mampu
    - 3) Tunjangan kesehatan dan santunan duka bagi RT/RW dan petugas Rumah Ibadah
  - 2) Lingkungan
    - 4) Palu Adipura
    - 5) Palu Terang

#### **2.4. Review Terhadap Rancangan Program Perubahan RKPD Kota Palu Tahun 2023**

Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu Tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat : a) Rancangan kerangka ekonomi daerah b) Program prioritas pembangunan daerah c) Rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju, yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS. Rencana kerja Kecamatan Mantikulore berdasarkan RKPD Kota Palu sifatnya sebagai pendukung dari pelaksanaan Renja OPD se-Kota Palu yang melaksanakan program dan kegiatan berlokasi di wilayah Kecamatan Mantikulore.

Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2023 disajikan pada Tabel 2.3 di bawah ini.

**Tabel 2.3**  
**Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD**

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
A.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	Kota Palu				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	Kota Palu				
a)	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Palu				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Palu				
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Palu	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1.465.400	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Palu	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1.465.400	
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Kota Palu	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	1 Dokumen	7.490.500	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Kota Palu	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	1 Dokumen	7.490.500	
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Kota Palu	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	1 Dokumen	7.490.500	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Kota Palu	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	1 Dokumen	7.490.500	
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Palu	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	1.781.500	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Palu	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	1.781.500	
b)	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Palu				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Palu				
5	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Palu	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	..... Orang	8.285.468.588	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Palu	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	..... Orang	8.285.468.588	
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Palu	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2.126.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Palu	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2.126.000	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
A.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	Kota Palu				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	Kota Palu				
c)	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Palu				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Palu				
7	Penyediaan Komponen Intalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Kota Palu	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	6.702.100	Penyediaan Komponen Intalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Kota Palu	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	6.702.100	
8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Palu	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket	255.453.732	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Palu	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket	255.453.732	
9	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Palu	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Paket	3.121.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Palu	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Paket	3.121.000	
10	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Palu	Jumlah Paket Bahan Logistik yang disediakan	Paket	247.285.940	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Palu	Jumlah Paket Bahan Logistik yang disediakan	Paket	247.285.940	
11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Palu	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	34.036.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Palu	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	34.036.000	
12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Palu	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan yang disediakan	Dokumen	27.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Palu	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan yang disediakan	Dokumen	27.000.000	
13	Fasilitas Kunjungan Tamu	Kota Palu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	55.715.000	Fasilitas Kunjungan Tamu	Kota Palu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	55.715.000	
14	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Palu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	175.230.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Palu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	175.230.000	

A.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	Kota Palu				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	Kota Palu				
d)	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Kota Palu				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Kota Palu				
15	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Palu	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	46.786.000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Palu	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	46.786.000	
16	Pengadaan Mebel	Kota Palu	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	28.838.500	Pengadaan Mebel	Kota Palu	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	28.838.500	
17	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Palu	Jumlah Paket Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Unit	11.800.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Palu	Jumlah Paket Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Unit	11.800.000	
18	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Palu	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Unit	1.450.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Palu	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Unit	1.450.000	
19	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Palu	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	54.227.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Palu	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	54.227.000	
e)	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Kota Palu				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Kota Palu				
20	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Palu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	183.676.800	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Palu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	183.676.800	
21	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Palu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	667.878.400	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Palu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	667.878.400	

A.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	Kota Palu				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	Kota Palu				
f)	Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kota Palu				Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kota Palu				
22	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Palu	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 Unit	442.800.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Palu	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 Unit	442.800.000	
23	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Palu	Jumlah Peralatan Mesin Lainnya yang dipelihara	Unit	19.800.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Palu	Jumlah Peralatan Mesin Lainnya yang dipelihara	Unit	19.800.000	
24	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Palu	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	10.800.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Palu	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	10.800.000	
B.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik					Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik					
g)	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak di Laksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan					Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak di Laksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan					
25	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kota Palu	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	121.738.300	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kota Palu	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	121.738.300	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
C.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan	Kota Palu				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan	Kota Palu				
h)	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kota Palu				Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kota Palu				
26	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kota Palu	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Terlaksananya Musrenbang)	Lembaga	81.345.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kota Palu	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Terlaksananya Musrenbang)	Lembaga	81.345.000	
27	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kota Palu	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	1.234.462.487	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kota Palu	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	1.234.462.487	
28	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kota Palu	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas	6.161.716.419	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kota Palu	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas	6.161.716.419	
i)	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Kota Palu				Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Kota Palu				
29	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kota Palu	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Lembaga	2.222.916.150	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kota Palu	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Lembaga	2.222.916.150	
D.	Program Penyelenggaraan Urusan	Kota Palu				Program Penyelenggaraan Urusan	Kota Palu				
j)	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	Kota Palu				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	Kota Palu				
30	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kota Palu	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Orang	253.125.000	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kota Palu	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Orang	253.125.000	

## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam pelaksanaan Musrenbang Tahun 2023, terdapat program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi - asosiasi, Perangkat Daerah yang terkait dengan tugas dan fungsi Kecamatan Mantikulore sebagai unsur penunjang Pemerintahan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah, berdasarkan Rekapitulasi Hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Kecamatan Tahun 2022 terdapat satu usulan Program kegiatan. Berikut ini akan disajikan pada Tabel 2.4:

**Tabel 2.4**  
**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan**  
**Tahun 2023**

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1	Program Pemberdayaan Masyarakat	Kec. Mantikulore	Terbangunnya Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat	1.600.000.000	

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi. Sesuai dengan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) kantor Kecamatan Mantikulore maka program-program yang akan dilaksanakan Tahun Anggaran 2023 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodesifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut :

**1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, meliputi kegiatan :**

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
  - 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD
  - 3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD
  - 4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS
  - 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

- 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - 3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
  - 4) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  - 5) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - 6) Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan
  - 7) Fasilitas Kunjungan Tamu
  - 8) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 1) Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  - 2) Pengadaan Mebel
  - 3) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - 4) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
  - 5) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 1) Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - 2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  - 2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

- 3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

**2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**

1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
  - 1) Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

**3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan, meliputi kegiatan :**

1. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
  - 1) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan
  - 2) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
  - 3) Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan
2. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
  - 1) Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan

**4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, meliputi kegiatan :**

1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah, terdiri dari 1 (satu) Sub Kegiatan yaitu :
  - 1) Pembinaan Kerukunan Antarsuku Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional.

Kecamatan Mantikulore dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2023 mengacu pada dokumen Perubahan Rencana

Strategis (P-RENSTRA) Tahun 2021-2026 dan RKPD Kota Palu Tahun 2023 untuk mendukung pencapaian visi misi Pemerintah Kota Palu periode 2021-2026 berdasarkan tugas dan fungsi. Rencana Kerja Kecamatan Mantikulore Tahun 2023 yang dituangkan dalam rencana program dan kegiatan beserta rencana pendanaannya dapat dilihat pada Tabel TC. 33 dibawah ini.



**Tabel 3.1**

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN KEC. MANTIKULORE TAHUN 2023**

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	
				Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Bertambah / Berkurang			
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Rp	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 6	10 = 9/6	11	
7.01.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Evaluasi Kinerja Kecamatan (EKK)</b>		100%	10.578.422.960		10.333.448.166				
7.01.01.2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		100%	18.227.900		7.106.059	-	11.121.841		
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Palu	1 Dokumen	1.465.400	1 Dokumen	1.138.660	-	326.740	-	0,223
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Kota Palu	1 Dokumen	7.490.500	1 Dokumen	2.355.109	-	5.135.391	-	0,686
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	Kota Palu	1 Dokumen	7.490.500	1 Dokumen	2.355.109	-	5.135.391	-	0,686
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Palu	1 Laporan	1.781.500	1 Laporan	1.257.181	-	524.319	-	0,294
7.01.01.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			100%	8.287.594.588	100%	8.514.360.889				
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Palu	101 Orang	8.285.468.588	101 Orang	8.513.103.708		227.635.120		0,027
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Palu	1 Laporan	2.126.000	1 Laporan	1.257.181	-	868.819	-	0,409

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	
				Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Bertambah / Berkurang			
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Rp	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 6	10 = 9/6	11	
<b>7.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			<b>100%</b>	<b>804.543.772</b>	<b>100%</b>	<b>578.005.415</b>				
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Palu	5 Jenis	6.702.100	5 Jenis	4.044.520	-	2.657.580	-	0,397
7.01.01.2.06.02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Kota Palu	5 Jenis	255.453.732	5 Jenis	64.313.780	-	191.139.952	-	0,748
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Kota Palu	5 Jenis	3.121.000	5 Jenis	3.024.075	-	96.925	-	0,031
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik yang disediakan	Kota Palu	5 Jenis	247.285.940	5 Jenis	272.271.132		24.985.192		0,101
7.01.01.2.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Palu	3 Paket	34.036.000	3 Paket	30.167.246	-	3.868.754	-	0,114
7.01.01.2.06.06	Penyediaan bahan bacaan dan perundang undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan yang disediakan	Kota Palu	138 Dokumen	27.000.000	138 Dokumen	20.212.902	-	6.787.098	-	0,251
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Palu	11 Laporan	55.715.000	11 Laporan	30.712.382	-	25.002.618	-	0,449
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Palu	19 Laporan	175.230.000	19 Laporan	153.259.378	-	21.970.622	-	0,125
<b>7.01.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			<b>100%</b>	<b>143.101.500</b>	<b>100%</b>	<b>92.116.729</b>				
7.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kota Palu	24 Unit	46.786.000	24 Unit	38.537.225	-	8.248.775	-	0,176
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kota Palu	50 Unit	28.838.500	50 Unit	8.166.829	-	20.671.671	-	0,717
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Paket Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Kota Palu	1 Unit	11.800.000	1 Unit	15.312.805		3.512.805		0,298
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Kota Palu	1 Unit	1.450.000	1 Unit	25.521.341		24.071.341		16,601
7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kota Palu	9 Unit	54.227.000	9 Unit	4.578.529	-	49.648.471	-	0,916
<b>7.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>100%</b>	<b>851.555.200</b>	<b>100%</b>	<b>832.693.173</b>				

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Rencana Tahun 2023						Catatan Penting
				Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Bertambah / Berkurang		
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 6	10 = 9/6	11
<b>7.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>100%</b>	<b>851.555.200</b>	<b>100%</b>	<b>832.693.173</b>			
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Palu	36 Laporan	183.676.800	36 Laporan	124.290.974	- 59.385.826	- 0,323	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Palu	48 Laporan	667.878.400	48 Laporan	708.402.199	40.523.799	0,061	
<b>7.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>100%</b>	<b>473.400.000</b>	<b>100%</b>	<b>309.165.901</b>			
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Kota Palu	25 Unit	442.800.000	25 Unit	284.078.423	- 158.721.577	- 0,358	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Mesin Lainnya yang dipelihara	Kota Palu	78 Unit	19.800.000	78 Unit	21.029.585	1.229.585	0,062	
7.01.02.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Palu	46 Unit	10.800.000	46 Unit	4.057.893	- 6.742.107	- 0,624	
<b>7.01.02</b>	<b>PROGRAM PENTELONGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN BURLIV</b>	<b>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</b>	<b>N/A</b>	<b>100%</b>	<b>121.738.300</b>	<b>100%</b>	<b>15.861.673</b>			
7.01.02.2.01	<b>Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>Cakupan Peningkatan Efektifitas Pelayanan pada Masyarakat</b>		<b>Jenis</b>	<b>121.738.300</b>	<b>Jenis</b>	<b>15.861.673</b>			
7.01.02.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Terlaksananya Musrenbang)	Kota Palu	1 Laporan	121.738.300	1 Laporan	15.861.673	- 105.876.627	- 0,870	
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>			<b>100%</b>	<b>9.700.440.056</b>	<b>100%</b>	<b>7.715.122.162</b>			

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Rencana Tahun 2023						Catatan Penting
				Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Bertambah / Berkurang		
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 6	10 = 9/6	11
7.01.03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Nilai Evaluasi Kinerja Kecamatan (EKK)</b>		100%	9.700.440.056	100%	7.715.122.162			
7.01.03.2.02	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>			100%	7.477.523.906	100%	6.382.885.791			
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Terlaksananya Musrenbang)	Kota Palu	40 Lembaga Masyarakat	81.345.000	40 Lembaga Masyarakat	45.632.158	- 35.712.842	- 0,439	
7.1.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kota Palu	26 Unit	1.234.462.487	26 Unit	1.648.433.641	413.971.154	0,335	
7.1.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kota Palu	10 Pokmas	6.161.716.419	10 Pokmas	4.688.819.992	- 1.472.896.427	- 0,239	
7.01.03.2.03	<b>Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Tingkat Kecamatan</b>			100%	2.222.916.150	100%	1.332.236.371			
7.1.02.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Masyarakat	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Diselenggarakan	Kota Palu	40 Lembaga Masyarakat	2.222.916.150	40 Lembaga Masyarakat	1.332.236.371	- 890.679.779	- 0,401	
7.01.05	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>Nilai Evaluasi Kinerja Kecamatan (EKK)</b>		100%	253.125.000	100%	97.338.396			
7.01.05.2.01	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>			100%	253.125.000	100%	97.338.396			
7.1.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antar suku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemaman Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kota Palu	54 orang	253.125.000	54 orang	97.338.396	- 155.786.604	- 0,615	

Dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, maka diharapkan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Mantikulore Tahun 2023, dapat digunakan sebagai pedoman kerja bagi aparatur Kecamatan Mantikulore sesuai dengan Visi dan Misi yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Mantikulore selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2023 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Kecamatan Mantikulore. Perubahan Rencana Kerja (Renja) juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para Pimpinan dan seluruh staf Kecamatan Mantikulore sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik di masa datang.

Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Kecamatan Mantikulore Tahun 2023 adalah Dokumen Perencanaan Kecamatan Mantikulore untuk periode 1 (satu) Tahun yaitu Tahun 2023, Renja ini diharapkan mampu menjadi acuan dan pedoman Penyelenggaraan Program dan Kegiatan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Kecamatan Mantikulore pada Tahun 2023 agar sesuai dengan Strategi, Arah Kebijakan, Program dan Kegiatan yang ditetapkan. Dengan adanya Renja Kecamatan Mantikulore, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Kecamatan Mantikulore diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan.

Guna memperoleh optimalisasi pencapaian hasil, pada pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan di Wilayah Kecamatan Mantikulore, baik dalam kerangka regulasi maupun mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan

fungsi yang melekat pada masing-masing Perangkat Daerah serta pembagian urusan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk memperoleh keterpaduan dan sinkronisasi di dalam pelaksanaan program/kegiatan yang telah direncanakan, harus melalui proses musyawarah antar pelaku pembangunan melalui tahapan MUSRENBANG tingkat Kecamatan dan Kelurahan, agar program/kegiatan menjadi terintegrasi baik antar kegiatan, program maupun sektor. Dalam upaya Sinkronisasi dan Sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan yang bersumber dari APBD Kota Palu harus memperhatikan / mempedomani dokumen - dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya (RKPD, RPJMN, RPJPD Provinsi, RPJMD Provinsi, RKPD Provinsi, RPJPD Kota Palu, Rancangan RPJMD Kota Palu 2021-2026, Rancangan RKPD Kota Palu Tahun 2023, serta Visi misi Kepala Daerah periode 2021-2024.

Dengan demikian Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Kecamatan Mantikulore Tahun 2023 disusun agar dapat dipakai sebagai pedoman penetapan kebijakan, program dan strategi yang dilakukan pada Tahun berikutnya untuk dapat mendukung program-program Pemerintah Pusat maupun Daerah.

Palu, 02 Oktober 2023  
CAMAT MANTIKULORE,



**RIDWAN MUSTAPA, S.Sos.,M.Adm.KP**  
NIP. 19720306 200501 1 010